

PENURUNAN STUNTING BERBASIS STAKEHOLDER DI KABUPATEN AGAM

Nur Asiah¹, Khairul²

¹ Institut Teknologi Dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi, Jl. Raya Pakan Kamis, Sumatera Barat, Indonesia

² STIA Adabiah, Jl. Jati Adabiah No.1, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

Email: nuriasiah.agam@gmail.com

Article History

Received: 05-09-2025

Revision: 12-09-2025

Accepted: 14-09-2025

Published: 16-09-2025

Abstract. The policy for accelerating the reduction of stunting is a government policy aimed at preventing and reducing cases of stunting. The implementation of the policy for the rapid reduction of stunting in Agam Regency involves various parties. In optimizing the roles of each stakeholder involved, it is necessary to identify the roles of stakeholders. The aim of this research is to identify stakeholders and their roles. This research uses a qualitative descriptive research method. The source of data is interviews with informants. The data analysis technique used is qualitative data analysis with stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research results show that stakeholders in the implementation of the stunting reduction acceleration policy in Agam Regency, based on their roles in the policy implementation in Agam Regency, have roles as policy creators, coordinators, implementers, facilitators, and accelerators. The roles performed by stakeholders meet the classification of stakeholder roles, although there are still some obstacles and challenges. The factors hindering the roles of stakeholders come from the perspectives of actors and the participation of actors.

Keywords: Stakeholders, Role of Stakeholders, Stunting

Abstrak. Kebijakan percepatan penurunan *stunting* sebagai kebijakan pemerintah untuk mencegah dan menurunkan kasus *stunting*. Pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Agam melibatkan berbagai pihak. Dalam mengoptimalkan peran setiap *stakeholders* yang terlibat maka diperlukan adanya pengidentifikasian peran *stakeholders*. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi *stakeholders*, peran *stakeholders*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data wawancara dengan informan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *stakeholders* dalam pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Agam berdasarkan perannya dalam pelaksanaan kebijakan di Kabupaten Agam, *stakeholders* memiliki peranan sebagai *policy creator*, koordinator, implementor, fasilitator, serta akselerator. Peranan yang dilakukan oleh *stakeholders* telah memenuhi klasifikasi peran *stakeholders*, meskipun masih memiliki beberapa kendala dan tantangan. Faktor penghambat peran *stakeholders* berasal dari perspektif aktor dan partisipasi aktor.

Kata Kunci: Stakeholders, Peran Stakeholders, Stunting.

How to Cite: Asiah, N & Khairul. (2025). Penurunan Stunting Berbasis Stakeholder di Kabupaten Agam. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 6 (6), 9434-9449. <http://doi.org/10.54373/imeij.v6i6.4201>

PENDAHULUAN

Stunting merupakan masalah gizi yang sangat serius yang dihadapi oleh anak-anak di seluruh dunia. Periode ini terjadi ketika anak mengalami gangguan pertumbuhan, sehingga tinggi badan anak tidak sesuai dengan usianya. Masalah ini disebabkan oleh kekurangan gizi yang terjadi dalam jangka panjang, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, yang meliputi periode kehamilan hingga usia dua tahun. Kondisi stunting bukan hanya mempengaruhi perkembangan fisik anak, tetapi juga dapat berdampak serius pada perkembangan otak dan kemampuan kognitif pada anak. Anak-anak yang mengalami stunting, cenderung memiliki kesulitan dalam belajar, kurang berprestasi di sekolah, serta memiliki potensi produktivitas yang lebih rendah ketika dewasa.

Menggunakan data EPPBGM dan SSGI, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mendapatkan data akurat mengenai kondisi kesehatan masyarakat Indonesia. Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengatakan Aplikasi elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat (e-PPGBM) membantu diagnosis yang dilakukan dalam audit kasus *stunting* oleh para ahli berjalan maksimal. Dalam melakukan audit kasus *stunting*, sumber data yang digunakan adalah data e-PPGBM sebagai data dasar dari deteksi dini sasaran bermasalah gizi. Aplikasi e-PPGBM merupakan sebuah aplikasi elektronik yang digunakan untuk mencatat dan sekaligus melaporkan gizi langsung dari masyarakat. e-PPGBM hanya bisa di akses oleh pegawai puskesmas, kader posyandu dan semua pegawai di Kemenkes RI. Sedangkan SSGI merupakan survei nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia. Tujuannya adalah untuk memantau dan mengevaluasi status gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan ibu hamil. Selain itu, SSGI bertujuan mengukur capaian target antara percepatan penurunan prevalensi stunting, dalam penelitian ini peneliti menggunakan data SSGI.

Stunting masih menjadi salah satu permasalahan kesehatan utama yang dihadapi oleh berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Provinsi Sumatera Barat. Angka prevalensi stunting mencerminkan kondisi gizi balita serta menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan. Untuk melihat lebih jelasnya kondisi perkembangan prevalensi balita stunting di Sumatera Barat dalam tiga tahun terakhir, seperti tabel dibawah ini. Data prevelensi balita *stunting* per kabupaten kota di Provinsi Sumatera Barat menurut data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2022-2024.

Tabel 1. Prevalensi Balita Stunting Per Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2024

No	Kabupaten Kota	Prev Stunting (%)		
		2022	2023	2024
1	Pasaman Barat	35,5	29,7	27,3
2	Kep. Mentawai	32,0	33,7	34,5
3	Solok Selatan	31,7	14,7	13,6
4	Sijunjung	30,0	28,5	26,7
5	Pesisir Selatan	29,8	27	26,8
6	Pasaman	28,9	29,4	30,2
7	Padang Pariaman	25,0	19,4	18,5
8	Dharmasraya	24,6	17,7	16,2
9	Agam	24,6	20,1	19,8
10	Lima Puluh Kota	24,3	28,6	29,7
11	Kab. Solok	24,2	25,4	26,9
12	Kota Padang	19,5	24,2	25,4
13	Tanah Datar	18,9	18,5	17,9
14	Kota Pariaman	18,4	17,7	17,1
15	Kota Solok	18,1	16,3	15,3
16	Kota Payakumbuh	17,8	19,8	20,2
17	Kota Padang Panjang	16,8	15,8	15,1
18	Kota Bukittinggi	16,8	20,1	21,5
19	Kota Sawahlunto	13,7	19,5	20
	Sumatera Barat	25,2	23,6	22,7
	Indonesia	21,6	21,5	21,3

Sumber : Data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2022-2024

Berdasarkan tabel 1. di atas data prevalensi balita stunting per kabupaten kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022-2024 terlihat masih terjadi peningkatan dan penurunan angka prevalensi stunting. Data di Sumatera Barat tahun 2022 prevalensi stunting 25,2% mengalami penurunan tahun 2023 menjadi 23,6%, dan tahun 2024 menjadi 22,7%. Data di Indonesia tahun 2022 prevalensi stunting 21,6% mengalami penurunan tahun 2023 menjadi 21,5%, dan tahun 2024 menjadi 21,3%. Data di Kabupaten Agam tahun 2022 prevalensi stunting 24,6% mengalami penurunan tahun 2023 menjadi 20,1%, dan tahun 2024 menjadi 19,8%. Meskipun prevalensi stunting di Kabupaten Agam mengalami penurunan, namun penurunan prevalensi balita *stunting* sedikit dan target stunting yg ditargetkan Kabupaten Agam Tahun 2024 sebesar 14%, hal ini berarti belum mencapai target Kabupaten Agam. Berikut ini data prevalensi stunting per Kecamatan di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat menurut data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2024 :

Tabel 2. Sebaran Prevalensi Stunting Kabupaten Agam Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah	Persentase
1	Tanjung Mutiara	39	6,9
2	Lubuk Basung	257	29,16
3	IV Nagari	111	57,49
4	Tanjung Raya	146	30,46
5	Matur	74	43,46
6	IV Koto	151	63,57
7	Malalak	37	26,65
8	Banuhampu	205	61,33
9	Sungai Pua	151	57,78
10	IV Angkek	202	51,27
11	Canduang	159	29,15
12	Baso	125	45,34
13	Tilatang Kamang	195	25,17
14	Kamang Magek	105	54,74
15	Palembayan	230	105,03
16	Palupuah	51	30,21
	JUMLAH	2.238	7,01

Sumber : Data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2024

Berdasarkan tabel 1.2 di atas menggambarkan bahwa terjadi penurunan stunting yg dilakukan stakeholder, hal ini dapat dilihat dari data sebaran Prevalensi Stunting Kabupaten Agam Tahun 2024 terdapat 2.238 jumlah kasus dengan persentase 7,01%, dibandingkan dengan target stunting yg ditargetkan Kabupaten Agam Tahun 2024 sebesar 14%. Ini menggambarkan terjadinya penurunan angka stunting yg dilakukan stakeholder di Kabupaten Agam. Berikut ini data Rekap Kasus Stunting Dinas Kesehatan Kabupaten Agam Tahun 2022-2024.

Tabel 3. Rekap Kasus Stunting Dinas Kesehatan Kabupaten Agam Tahun 2022-2024

No	Puskesmas	2022		2023		2024	
		Jumlah Kasus	%	Jumlah Kasus	%	Jumlah Kasus	%
1	Tiku	39	2,58	16	1,22	21	1,61
2	Muaro Putus	34	3,90	18	2,11	18	2,06
3	Lubuk Basung	40	1,45	101	3,85	159	5,97
4	Manggopoh	27	1,15	63	2,78	98	4,28
5	Bawan	73	4,73	91	5,88	99	6,68
6	Batu Kambing	79	12,95	68	12,14	47	8,03
7	Maninjau	29	2,52	33	2,84	31	2,62
8	Pasar Ahad	97	7,79	67	5,95	80	7,53
9	Matur	49	4,63	83	8,49	74	7,17
10	Iv Koto	215	12,91	163	10,25	151	9,53
11	Malalak	41	6,88	31	5,40	37	6,63

12	Padang Luar	225	8,76	237	9,61	205	8,52
13	Sungai Pua	165	10,27	157	9,31	151	9,27
14	Biaro	172	5,67	227	7,33	202	6,85
15	Lasi	92	5,87	160	10,15	159	9,90
16	Baso	76	5,34	75	5,47	83	6,27
17	Padang Tarok	50	5,15	39	4,46	42	4,60
18	Pakan Kamis	94	6,88	161	11,31	164	11,90
19	Kapau	41	5,23	33	4,15	31	3,97
20	Magek	97	8,27	100	9,86	105	9,32
21	Palembayan	63	10,79	68	11,70	82	13,40
22	Koto Alam	103	5,56	188	10,54	148	8,38
23	Palupuh	108	12,34	56	6,96	51	6,30
Jumlah		2009	6,06	2235	6,97	2238	7,01

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Agam, 2025

Berdasarkan tabel 3 di atas data Rekap Kasus Stunting Dinas Kesehatan Kabupaten Agam tahun 2022-2024 terjadi peningkatan jumlah kasus stunting di Kabupaten Agam. Pada tahun 2022 jumlah kasus stunting di Kabupaten Agam 2.009 kasus dengan persentase 6,06%, pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 2.235 kasus dengan persentase 6,97% dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 2.238 kasus dengan persentase 7,01%. Peneliti mengambil 3 Pukesmas sebagai sampel mewakili Agam Barat dengan alasan peneliti mengambil sampel pukesmas Lubuk Basung karena jumlah penduduknya banyak, karena sanitasi kurang gizi faktor kemiskinan dan Peneliti mengambil 3 sampel kasus di Pukesmas mewakili Agam Timur dengan alasannya jumlah tenaga medisnya banyak karena Kabupaten Agam ada 2 yaitu Agam Barat dan Agam Timur.

Faktor Penyebab Stunting pada anak-anak adalah masalah Asupan gizi saat balita atau Pra sekolah yang kurang memadai, infeksi berulang, dan kondisi sosial ekonomi yang rendah, faktor ekonomi keluarga juga menjadi salah satu determinan utama dalam masalah gizi buruk, keluarga dengan pendapatan rendah cenderung memiliki anak yang lebih rentan terhadap stunting. Pendidikan ibu juga berperan penting, di mana ibu yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung memberikan asupan gizi yang lebih baik kepada anak-anak mereka.

Kabupaten Agam yang memiliki banyak potensi tetapi juga tantangan dalam hal kesehatan anak. Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Agam menunjukkan bahwa pada tahun 2024, prevalensi stunting di beberapa kecamatan masih berada di atas 25%. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun ada berbagai inisiatif yang telah dilakukan hasilnya belum optimal. Misalnya, program-program intervensi gizi yang dilaksanakan di daerah tersebut sering kali tidak terintegrasi dengan baik, dampaknya terhadap penurunan angka stunting menjadi tidak

signifikan. Hal ini menandakan perlunya pendekatan yang lebih terkoordinasi dan berbasis *stakeholder* (Pemangku Kepentingan) untuk mencapai target penurunan stunting yang ditetapkan oleh Kabupaten Agam tahun 2024 sebesar 14% pada tahun 2024.

Cegah stunting atau tubuh pendek akibat kurang gizi kronik itu Penting dan selamatkan periode 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan), upaya ini sangat diperlukan, mengingat stunting akan berpengaruh terhadap tingkat kecerdasan anak dan status kesehatan pada saat dewasa. Seribu hari pertama kehidupan (1000 HPK) anak adalah waktu paling kritis dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Masa 1000 HPK terdiri atas 270 hari selama kehamilan dan 730 hari pada dua tahun pertama kehidupan. Pola makan gizi seimbang harus diterapkan mulai dari masa kehamilan, dilanjutkan dengan pemberian ASI eksklusif dan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI). Ada delapan aksi agenda aksi intervensi stunting di Kabupaten Agam, analisa situasi, rencana kegiatan, rembut stunting, penyusunan perbub, pembinaan kader pembangunan manusia, sistem manajemen data stunting, pengukuran dan publikasi data stunting, review kinerja, saat ini untuk analisa situasi dan rencana kegiatan sebagai aksi I dan II telah dilaksanakan.

Penurunan angka stunting di Kabupaten Agam masih belum bisa mencapai target nasional yang menargetkan angka prevalensi stunting dibawah 14%, Provinsi Sumatera Barat yang menargetkan angka prevalensi stunting dibawah 14%, dan Kabupaten Agam menargetkan angka prevalensi stunting dibawah 14%. Hal itu di buktikan dengan data angka prevalensi stunting di Kabupaten Agam pada tabel 1.1 tahun 2022 angka prevalensi stunting 24,6%, tahun 2023 angka prevalensi stunting turun menjadi 20,1% dan pada tahu 2024 angka prevalensi stunting mengalami kenaikan menjadi 19,8%. Angka prevalensi stunting di Kabupaten Agam masih tinggi dan belum mencapai target provinsi dan target nasional, Penurunan angka prevalensi stunting di Kabupaten Agam dari tahun 2022 s/d 2024 masih rendah, hal ini diakibatkan belum optimalnya pelibatan stakeholder (Pemangku kepentingan), pemerintah masih bekerja sendiri, yang baru bergerak itu adalah *stakeholder* dari sisi pemerintah (Dinas Dalduk KB PA dan PA Kabupaten Agam, Dinas sosial Kabupaten Agam, Dinas kesehatan Kabupaten Agam, Bapeda Kabupaten Agam dan TPPS Kabupaten Agam) sedangkan *stakeholder* non pemerintah (MUI Kabupaten Agam, LKAAM Kabupaten Agam, Bundo Kandung Kabupaten Agam, TP.PKK Kabupaten Agam dan Baznas Kabupaten Agam) belum sepenuhnya dilibatkan, padahal pengaruh dari *stakeholder* non pemerintah itu di tengah masyarakat cukup besar atau punya pengaruh kuat. Alasan memilih informan seperti LKAAM Kabupaten Agam, untuk percepatan penurunan stunting di kabupaten Agam LKAAM memberikan dorongan kepada seluruh ninik mamak yang ada di nagari dikaum untuk dapat

berperan dalam rangka membantu pencegahan stunting, LKAAM menyampaikan kepada ninik mamak untuk dapat memberi tahu kepada keluarga melalui orang tua bahwa masalah stunting itu sudah harus dicegah semenjak dalam kandungan.

Kurangnya Kolaborasi antar berbagai stakeholder, yang bergerak cuma pelaku program pemerintah saja sedangkan pelaku program non pemerintah hanya bersifat sukarela bukan bahagian yang terstruktur. Kondisi ini menciptakan jurang antara program yang dirancang dengan penerapannya di tengah masyarakat, walaupun SK TPPS sudah ada tapi Peran serta Tim Belum optimal, Kebijakan hanya bersifat Himbauan bukan regulasi yang mengikat secara struktural. Inilah yang menyebabkan belum optimalnya penurunan angka prevalensi stunting di Kabupaten Agam. Penyebab stunting bukan saja masalah sektor kesehatan akan tetapi masalah non kesehatan di antaranya masalah ekonomi, sosial budaya dan masalah lingkungan seperti perbaikan pola makan, perbaikan pola asuh, dan perbaikan sanitasi dan akses air bersih. Selain itu penyebab stunting antara lain Wanita Usia Subur (WUS) dengan Kurang Energi Kronis (KEK), Anemia pada ibu hamil, Riwayat bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), Tidak diberikan ASI Eksklusif, Kurangnya asupan zat gizi dan Kondisi sosial ekonomi dan lingkungan.

Kabupaten Agam saat ini sedang melaksanakan aksi percepatan penurunan stunting bekerjasama dengan beberapa organisasi perangkat kecamatan lainnya. Pelaksanaan percepatan penurunan stunting tidak terlepas dari peran *stakeholder* mulai dari tingkat kecamatan sampai ketinggian desa/nagari, setiap *stakeholder* memiliki perannya tersendiri, karena banyaknya pihak yang terlibat pekerjaan yang dilakukan menjadi tumbang tindih.

Tantangan yang dihadapi dalam implementasi program berbasis *stakeholder* ini tidaklah sedikit. Salah satu kendala utama adalah kurangnya koordinasi antara berbagai instansi pemerintah dan organisasi non pemerintah. Seringkali, program-program yang dijalankan tidak saling terintegrasi, mengakibatkan pemborosan sumber daya dan minimnya dampak yang diharapkan. Diperlukan sebuah platform atau forum yang dapat memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antar *stakeholder*, sehingga semua pihak dapat bekerja sama dengan lebih efektif. Dalam rangka memaksimalkan hasil dari pendekatan berbasis *stakeholder*, penting untuk melakukan evaluasi secara berkala. Evaluasi ini tidak hanya bertujuan untuk mengukur keberhasilan program, tetapi juga untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Dengan melakukan evaluasi, *stakeholder* dapat belajar dari pengalaman dan membuat penyesuaian yang diperlukan agar program yang dijalankan lebih efektif dalam mengatasi masalah stunting. Berbagai Upaya telah dilakukan oleh pemkab agam dalam menekan kasus stunting diantaranya memasukan stunting kedalam program Unggulan Bupati Agam, membuat pusat data yang

sudah di *launching* dalam aplikasi SIKOCIT (Sistem informasi dan koordinasi cegah stunting), dan Program Bapak Asuh Anak Stunting yang disebut BASARAGAM (Bapak Asuh Anak Stunting Rang Agam). Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana pendekatan berbasis *stakeholder* dapat diterapkan di Kabupaten Agam untuk mempercepat penurunan stunting. Dengan mengidentifikasi peran dan kontribusi masing-masing *stakeholder*, serta menemukan strategi yang efektif untuk meningkatkan kolaborasi antar pihak, diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

METODE

Pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Agam melibatkan berbagai pihak. Dalam mengoptimalkan peran setiap *stakeholders* yang terlibat maka diperlukan adanya pengidentifikasian peran *stakeholders*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data wawancara dengan informan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN DISKUSI

Identifikasi Stakeholder

Stakeholder pada implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Agam terdiri dari beberapa *stakeholders*, yaitu berikut.

- *Stakeholder* pemerintah; Pada implementasi kebijakan, *stakeholder* negara seringkali memiliki kekuasaan yang lebih besar dibandingkan *stakeholder* lain. *Stakeholder* pemerintah terdiri dari organisasi atau lembaga pemerintahan yang terdiri dari Dinas Dalduk KB PP Dan PA, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Ketua TPPS, Bappeda. Adapula *stakeholder* di luar organisasi perangkat daerah yaitu puskesmas yang berada di bawah naungan Dinas Kesehatan.
- *Stakeholder* non pemerintah; Pada kajian terkait *stakeholder*, non pemerintah yang dimaksud tidak hanya masyarakat secara umum sebagai individu, tetapi dapat juga berupa kelompok atau komunitas. *Stakeholder* non pemerintah berasal dari luar pemerintah yang pelaksanaan turut membantu kebijakan. *Stakeholder* non pemerintah terdiri dari MUI, LKAAM, Baznas.
- *Stakeholder* Komunitas dan Masyarakat; *Stakeholder* komunitas dan masyarakat adalah semua pihak di dalam masyarakat, baik itu individu, komunitas atau kelompok masyarakat

yang memiliki sebuah hubungan dan kepentingan terhadap organisasi, dan permasalahan yang sedang dibahas. *Stakeholder* komunitas dan masyarakat terdiri dari Kader PKK, Kader KB, Bidan Desa, Tokoh Masyarakat.

Pelibatan *Stakeholder* Pemerintah dalam penurunan Angka Stunting di Kabupaten Agam

Penurunan angka stunting di Kabupaten Agam masih belum bisa mencapai target nasional yang menargetkan angka prevalensi stunting dibawah 14%, Provinsi Sumatera Barat yang menargetkan angka prevalensi stunting dibawah 14%, dan Kabupaten Agam menargetkan angka prevalensi stunting dibawah 14%. Angka prevalensi stunting di Kabupaten Agam masih tinggi dan belum mencapai target provinsi dan target nasional, Penurunan angka prevalensi stunting di Kabupaten Agam dari tahun 2022 s/d 2024 masih rendah.

Dikalangan ahli ekonomi ada anggapan bahwa masalah kemiskinan adalah akar dari masalah kekurangan gizi. Kemiskinan menyebabkan akses terhadap pangan di rumah tangga sulit dicapai sehingga orang akan kurang berbagai zat gizi yang dibutuhkan badan. Namun tidak banyak diketahui bahwa sebaliknya juga dapat terjadi. Kekurangan gizi dapat memiskinkan orang. Anak atau orang yang kekurangan gizi, mudah terserang penyakit, berarti sering absen sekolah atau bekerja. Hal ini beresiko berkurangnya pendapatan. Sering sakit berarti pengeluaran untuk berobat makin tinggi. Mereka dapat jatuh miskin karena pengeluaran rumah sakit dan dokter yang terus menerus.

Dengan demikian akibat dari kekurangan gizi apabila tidak diupayakan perbaikan, khususnya pada masa 1000 HPK, dapat membuat keluarga menjadi miskin atau tambah miskin. Pada akhirnya, akar masalah gizi berikutnya adalah faktor yang dapat berpengaruh pada semua faktor langsung dan tidak langsung diatas. Sering disebut sebagai *underlying factor* yaitu situasi politik, ekonomi dan sumber daya yang ada, yang meliputi sumber daya lingkungan, perubahan iklim, bencana dan sebagainya. Angka stunting tahun 2024 di Kabupaten Agam 19,8%, hal ini belum sesuai target bupati Kabupaten Agam dimana menargetkan 14%, untuk menurunkan angka stunting kita perlu proses melibatkan peran *stakeholder* jadi kita menggali peran dari *stakeholder* tersebut. Berikut ini hasil wawancara dengan *Stakeholder* Pemerintah tentang Pelibatan *Stakeholder* dalam penurunan Angka Stunting di Kabupaten Agam :

Tabel 4. Penerapan *Collaborative Governance* dalam penurunan Angka Stunting di Kabupaten Agam dilihat dari aspek Pemerintah :

Fokus	Temuan Lapangan	Analisa Tematik	Implikasi terhadap <i>Collaborative Governance</i>
-------	-----------------	-----------------	--

Dinas Dalduk KB PP Dan PA Kabupaten Agam	Dinas Dalduk KB PP Dan PA Kabupaten Agam Melakukan Sosialisasi Kepada TPK (Tim Pendamping Keluarga) yang terdiri dari : Bidan, Kader KB, Kader PKK untuk percepatan penurunan angka stunting	Konsolidasi koordinasi lintas sektor dan pemangku kepentingan untuk percepatan penurunan angka stunting	Menciptakan kebijakan yang sinergis dan partisipatif
Dinas Sosial Kabupaten Agam	Peran Dinas Sosial untuk percepatan penurunan stunting di kabupaten Agam bergerak dibidang pemberian bantuan berupa PKH, Penerima sembako, penerima PBIJK, Penerima BPJS	Dinsos berkaitan dengan data-data, Dinsos tidak terfokus dengan stunting	Mendorong keterlibatan dan kepercayaan dalam proses pengambilan keputusan
Dinas Kesehatan Kabupaten Agam	Peran Dinas Kesehatan untuk percepatan penurunan stunting di kabupaten Agam berada di upaya sensitive, Dinkes berperan sebagai penyedia data prevalensi dan Dinas Kesehatan juga berperan mengeluarkan data faktor determinan apa yang menyebabkan terjadinya stunting	Dinkes melahirkan inovasi berupa aplikasi sikocit yang khusus untuk petugas, Koordinasi Antar OPD, TPPS, begitu ada kasus baru notifikasi ini langsung terkirim ke sekretariat TPPS Dan Aplikasi Maceting (Mari Cegah Stunting)	Pemerintah menjadi lebih mandiri dan berdaya dalam percepatan penurunan stunting di kabupaten Agam
Bappeda Kabupaten Agam	Bappeda memiliki peran Strategis sebagai Wakil Ketua, Sebagai kordinator Perencanaan dan sinkronisasi lintas sektor	Bappeda juga bertugas mengawal implementasi Rencana Aksi Nasional Penurunan Stunting (RAN PASTI) ke dalam konteks lokal Agam	Menciptakan kebijakan yang sinergis dan partisipatif

Pelibatan *Stakeholder* Non Pemerintah dalam penurunan Angka Stunting di Kabupaten Agam

Tabel 5. Penerapan *Collaborative Governance* dalam penurunan Angka Stunting di Kabupaten Agam dilihat dari aspek Non Pemerintah :

Fokus	Temuan Lapangan	Analisa Tematik	Implikasi terhadap <i>Collaborative Governance</i>
MUI Kabupaten Agam	MUI memiliki peran melakukan sosialisasi berupa Himbuan Mui Tentang Stunting dan Mui ikut kegiatan rakor di Kabupaten,	MUI ikut kegiatan rakor, penanda tanganan	Mendorong keterlibatan dan kepercayaan dalam proses pengambilan keputusan

	MUI menyuarkan persoalan penurunan stunting, mengajak dan membuat edaran bersama dalam rangka penurunan stunting termasuk penanda tangan Komitmen Mui Iku	komitmen dan Rapat minilok di kecamatan	
LKAAM Kabupaten Agam	LKAAAM memberikan dorongan kepada seluruh ninik mamak yang ada di nagari dikaum untuk dapat berperan dalam rangka membantu pencegahan stunting, LKAAAM menyampaikan kepada ninik mamak untuk dapat memberi tahu kepada keluarga melalui orang tua bahwa masalah stunting itu sudah harus dicegah semenjak dalam kandungan	Dinsos berkaitan dengan data-data, Dinsos tidak terfokus dengan stunting	Kolaborasi LKAAM dan Stakeholder baik pemerintah dan non pemerintah sifatnya koordinasi
BAZNAS Kabupaten Agam	Baznas Kabupaten Agam, memberikan bantuan dikonfirmasi dulu sama Dinas KB, Dinkes, baznas memberikan bantuan tidak diberikan dalam bentuk uang tapi sesuai kebutuhan anak yang stunting	Baznas telah memberikan bantuan Basaragam	Tingkatkan Kordinasi dengan Stakeholder terkait jangan mengedepankan ego program

Pelibatan *Stakeholder* Komunitas dan Masyarakat dalam penurunan Angka Stunting di Kabupaten Agam

Tabel 6. Penerapan *Collaborative Governance* dalam penurunan Angka Stunting di Kabupaten Agam dilihat dari aspek Stakeholder komunitas dan masyarakat :

Fokus	Temuan Lapangan	Analisa Tematik	Implikasi terhadap <i>Collaborative Governance</i>
TP PKK Kabupaten Agam	TP PKK Kabupaten Agam punya program Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di desa, program Bina Keluarga Balita, Posyandu Remaja, dan Gerakan Cerdas Mengasuh Anak	TP PKK Kabupaten Agam melatih kader PKK di setiap nagari agar bisa memberikan penyuluhan langsung ke rumah tentang bahayanya stunting	TP PKK didukung dari mitra OPD yang menangani masalah stunting, juga bekerja sama dengan Puskesmas, Dinas Kesehatan, BKKBN, Dinas Pendidikan, dan juga Bundo Kandung serta Posyandu. Bahkan dengan guru PAUD dan kader dasawisma
Tokoh Masyarakat (Bundo Kandung) Kabupaten Agam	Bundo Kandung bertanggung jawab dalam penurunan angka stunting karena ini menyangkut anak cucu di rumah tangga Minang. Bundo Kandung mendampingi kaum ibu, memberi	Bundo Kandung memberikan pemahaman tentang Edukasi Gizi, kebersihan dan pengasuhan anak dalam kegiatan arisan dan pengajian	Bekerjasama dengan stakholder baik pemerintah maupun non pemerintah kolaborasinya dalam bentuk kegiatan rakor, dasawisma, gotong royong.

	penyuluhan, dan membimbing soal gizi, kebersihan, dan pengasuhan anak		
TPK (Kader KB,Kader PKK,Bidan	TPK Punya Aplikasi Elsimil sebagai alat deteksi dini dalam melakukan screaning pada sasaran KRS	Melakukan pendampingan (kunjungan rumah) kepada keluarga sasaran ,memberikan edukasi tentang gizi ,kespro dan pola asuh	TPK adalah aktor teknis lapangan yang menjembatani kebijakan pemerintah dengan kondisi nyata keluarga

Peran Stakeholder

Policy Creator

Dinas Dalduk KB PP Dan PA berperan sebagai *policy creator* karena memiliki wewenang dalam membuat program yang mendukung percepatan penurunan stunting. Peran Dinas Dalduk KB PP Dan PA adalah sebagai Pilar Utama dalam penurunan stunting di daerah atau sebagai motor penggerak yang melakukan intervensi Spesifik langsung kepada sasaran utama (Ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita) yang langsung berhubungan dengan penyebab utama stunting melalui TPK (Tim Pendampingan Keluarga), Sebagai Sekreatariat TPPS.

Dinas Dalduk KB PP Dan PA menjalankan Program Basaragam (Bapak dan Ibu Asuh Anak Stunting Rang Agam), dan Kami juga menjalankan Program quikwin BKKBN Melalui Genteng (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting) melalui OTA (Orang Tua Asuh), di mana tokoh masyarakat, ASN, dan instansi ikut menjadi pendamping bagi keluarga stunting. Ini memperkuat pendekatan sosial dan gotong royong. Selain itu, Dinas Dalduk KB PP Dan PA memperkuat peran Kampung KB dan kader Bina Keluarga Balita (BKB) di lapangan.

Sedangkan, peran Bappeda sebagai *policy creator* yaitu sesuai dengan SK TPPS Bappeda memiliki peran Strategis sebagai Wakil Ketua, Sebagai kordinator Perencanaan dan sinkronisasi lintas sektor Sebagai Admin TPPS, Bappeda memastikan bahwa program penurunan stunting ini menjadi bagian dari dokumen perencanaan daerah seperti RKPD dan RPJMD jadi Bappeda melakukan asistensi renja dari OPD dan tegging program. Bappeda juga bertugas mengawal implementasi Rencana Aksi Nasional Penurunan Stunting (RAN PASTI) ke dalam konteks

lokal Agam. Disamping perencanaan Bappeda juga mateging program kegiatan dan pelaporan 8 aksi konvergensi.

Koordinator

Menurut (Nugroho et al., 2014) koordinator merupakan *stakeholder* yang berperan dalam mengkoordinir *stakeholder* lain dalam rangka mencapai tujuan. *Stakeholder* yang berperan sebagai koordinator pada percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Agam yaitu Dinas Kesehatan, Bappeda, dan Dinas Dalduk KB PP Dan PA. Dalam bekerja mengatasi masalah *stunting*, Dinas Kesehatan berperan untuk mengkoordinir puskesmas. Mengingat bahwa puskesmas ini berada di bawah naungan Dinas Kesehatan dan puskesmas akan terjun ke lapangan untuk mengambil data baduta *stunting*. Dinas Kesehatan akan mengkoordinir puskesmas tersebut untuk melaporkan data kasus *stunting* perbulannya. Dinas Kesehatan juga mengkoordinir puskesmas dan kelurahan dalam penyaluran bantuan PMT yang ditujukan kepada balita *stunting* dan PMT untuk balita di posyandu. Peran Bappeda dalam masalah *stunting* lebih kepada mengkoordinasi OPD untuk turut serta mengintervensi masalah *stunting*. Dalam upaya penurunan *stunting* melibatkan berbagai OPD agar tetap mengintervensi masalah *stunting* sesuai dengan bidangnya Bappeda juga mengkoordinir dan mengumpulkan OPD untuk mengetahui program dan anggaran yang dimiliki.

Fasilitator

Bappeda berperan sebagai fasilitator dengan memfasilitasi para OPD untuk saling bekerja sama dalam mengatasi masalah *stunting*. Karena dalam mengatasi *stunting* memerlukan kerja sama dari lintas sektor agar dapat mencegah terjadinya *stunting* dan menekan kasus *stunting*. Dengan adanya fasilitas yang diberikan oleh Bappeda ini nantinya OPD dapat saling berkolaborasi dalam menjalankan program yang dapat menurunkan angka *stunting*. Puskesmas berperan sebagai fasilitator dengan menyediakan fasilitas kesehatan dalam menyelenggarakan upaya kesehatan baik promotif, preventif maupun rehabilitatif. Puskesmas memiliki peran yang cukup kompleks dengan melakukan sosialisasi kepada remaja, calon pengantin, ibu hamil hingga ibu yang memiliki anak *stunting*.

Peran PKK sebagai unit yang dekat dengan masyarakat untuk menyalurkan informasi lebih lanjut kepada masyarakat sangat penting karena masih ada *mindset* dari masyarakat setempat yang salah dalam mengartikan *stunting*. Masih adanya anggapan bahwa gizi buruk dan *stunting* adalah masalah kesehatan yang sama. Para kader PKK ini nantinya berperan dalam menyalurkan bantuan PMT tersebut kepada baduta *stunting* Kader PKK yang dekat dengan

masyarakat dan terlibat dalam pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*. Kader memiliki peran sebagai fasilitator dengan memberikan pendampingan dan menyalurkan informasi terkait *stunting* kepada masyarakat sebagai upaya preventif dalam mencegah *stunting* dan memberikan motivasi kepada keluarga.

TPK (Tim Pendamping Keluarga) yang dibentuk oleh pemerintah sampai tingkat desa /kelurahan yang anggotanya terdiri dari Bidan, kader KB, Kader PKK menjadi garda terdepan dalam penurunan stunting, karena melakukan pendampingan langsung kepada keluarga sasaran pada ibu hamil, ibu pasca salin, catin, baduta dan balita dengan cara memberikan edukasi tentang gizi, kespro dan pola asuh, hasil dari pendampingan diinput kedalam Aplikasi elsimil. Posyandu tidak hanya berperan dalam memberikan pelayanan kepada balita, tetapi juga kepada ibu hamil. Kader posyandu memberikan pendampingan kepada ibu hamil terutama kepada ibu hamil yang berisiko tinggi.

Implementor

Implementor merupakan *stakeholder* yang berperan sebagai pelaksanaan kebijakan yang di dalamnya termasuk kelompok sasaran dari kebijakan. Pada implementasi percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Agam, *stakeholder* yang berperan sebagai implementor yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Dalduk KB PP Dan PA, Kecamatan, dan Bundo Kanduang. Dinas Kesehatan memiliki beberapa program yang mendukung penurunan *stunting*. Dinas Kesehatan melaksanakan intervensi dari segi bidang kesehatan. Intervensi spesifik yang dilakukan Dinas Kesehatan dalam menangani masalah *stunting* dimulai dari masa remaja hingga balita. Pada remaja akan diberikan tablet tambah darah dan edukasi kesehatan reproduksi. Dinas Kesehatan memberikan layanan kepada ibu hamil dan nifas. Untuk ibu hamil KEK dan mengalami anemia sehingga tergolong berisiko tinggi nantinya akan diberikan bantuan dan dipantau oleh puskesmas sebagai perpanjangan tangan Dinas Kesehatan di wilayah kerjanya. Ibu hamil KEK dan anemia akan diintervensi melalui pemberian PMT selama 90 hari. Sedangkan, balita dengan gizi kurang dan juga akan *stunting* akan mendapatkan layanan kesehatan dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT).

Dinas Dalduk KB PP Dan PA berperan sebagai implementor pada percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Agam dengan menjalankan program yang sifatnya preventif. Dinas Dalduk KB PP Dan PA tidak hanya mengintervensi remaja, tetapi juga melalui berbagai kegiatan keluarga berencana. Intervensi Dinas Dalduk KB PP Dan PA ini sebenarnya lebih kepada tindakan preventif agar tidak terjadi kasus *stunting*. Dinas Dalduk KB PP Dan PA akan memberikan edukasi kepada calon pengantin agar turut mencegah *stunting* dan lebih matang

dalam mempersiapkan masa depan dan memperhatikan kesejahteraan anak kelak. Kecamatan berperan sebagai implementor dengan ikut terlibat pada pemberian sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten Agam. Pada setiap kesempatan yang melibatkan warga maka pihak kecamatan akan turut memberikan motivasi dan edukasi terutama kepada orang tua baduta *stunting*. Target percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Agam memang tidak ditarget secara pasti untuk jumlah anak yang lolos *stunting* setiap bulannya.

Bundo Kandung berperan sebagai implementor yang bertugas untuk membantu menerapkan pengasuhan yang baik kepada anak *stunting*. Karena penyebab utama *stunting* di Kabupaten Agam adalah pola asuh orang tuanya. Bundo Kandung adalah penjaga rumah tangga adat. Maka soal *stunting*, kami merasa sangat bertanggung jawab karena ini menyangkut anak cucu kita di rumah tangga Minang. Kami mendampingi kaum ibu, memberi penyuluhan, dan membimbing soal gizi, kebersihan, dan pengasuhan anak.

Akselerator

Akselerator adalah *stakeholder* yang mempercepat keberhasilan kebijakan (Nugroho et al., 2014). Akselerator dalam implementasi penurunan *stunting* di Kabupaten Agam berasal dari Baznas. Orang *stunting* yang di bantu baznas adalah orang asnaf berupa zakat, zakat di peruntukkan sudah sesuai dengan surat ataubah ayat 60 ada 6 asnaf, sebab *stunting* penyebabnya bukan miskin saja, orang kaya bisa *stunting* tidak bisa di bantu baznaz, penyebabnya mungkin faktor prilaku yang membuat anaknya *stunting*, di baznas telah melakukan bantuan tahun 2023 dan 2024 yang diajukan oleh kawan-kawan di KB sudah ditindak lanjuti berupa pembelian bantuan yang diperlukan apakah itu bahan-bahan makanan seperti susu yang telah ditentukan, telur didatangkan langsung ke lokasi dimana Keluarga *stunting* itu berada, itu berkelanjutan 3 bulan dikasih di di evaluasi kalau membutuhkan lagi bantu lagi kalau rasanya cukup stop, menentukan cukup tidaknya koordinasi dengan Dinas KB, Dinkes, pola di Baznas bantuan tidak berikan dalam bentuk uang tapi sesuai kebutuhan. Bantuan dari Baznas berupa bantuan Basaragam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian sebagai berikut :

- *Stakeholder* pada implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Agam terdiri dari beberapa *stakeholders*, yaitu *Stakeholder* pemerintah terdiri dari organisasi atau lembaga pemerintahan yang terdiri dari Dinas Dalduk KB PP Dan PA,

Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Ketua TPPS, Bappeda. Adapula *stakeholder* di luar organisasi perangkat daerah yaitu puskesmas yang berada di bawah naungan Dinas Kesehatan. *Stakeholder* non pemerintah berasal dari luar pemerintah yang pelaksanaan turut membantu kebijakan. *Stakeholder* non pemerintah terdiri dari MUI, LKAAM, Baznas. *Stakeholder* komunitas dan masyarakat terdiri dari Kader PKK, Kader KB, Bidan Desa, Tokoh Masyarakat

- Selanjutnya berdasarkan perannya, *stakeholders* melakukan lima klasifikasi peran yang meliputi *policy creator*, koordinator, fasilitator, implementor, serta akselerator. *Stakeholder* dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Agam telah memenuhi klasifikasi peran *stakeholder*, meskipun masih terdapat beberapa kendala di lapangan.
- Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menghambat peran *stakeholder* dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Agam terdiri atas faktor perspektif aktor dan partisipasi aktor. Dari segi perspektif aktor masih ada masyarakat yang kurang paham apa itu *stunting* dan adanya pandangan bahwa untuk menuju *zero stunting* menjadi hal yang susah untuk dicapai. Dari segi partisipasi aktor masih ada masyarakat yang tidak mau mengikuti kelas ibu hamil, sosialisasi bahkan menolak bantuan Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Partisipasi swasta juga masih terbatas padahal bantuan finansial dari pihak swasta sangat diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan.

REFERENSI

- Kemkes, R. I. (2021). *Infodatin Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI: Situasi Kesehatan Ibu*. Jakarta: Kemkes RI.
- Nugroho. (2014). *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Pustaka Pelajar.
- Nurfauziah, R., Noorsyarifa, G. C., & Irfan, M. (2021). Peran Stakeholder Dalam Mengatasi Tumbuh Kembang Anak Di Masa Pandemi (Studi Kasus Balita Kurang Gizi). *Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(3).
- Puspita, N. L., & Harsono, D. (2023). Stakeholder Analysis Dalam Penanganan Stunting Di Kabupaten Bantul. *Journal Of Public Policy And Administration Research E-Issn:*, 01.
- Rachma, N., Kismartini, K., & Hanani, R. (2022). *Peran Stakeholders Dalam Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting Di Kecamatan Semarang Barat*.
- Rachma, N., Kismartini, K., & Hanani, R. (2022). *Peran Stakeholders Dalam Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting Di Kecamatan Semarang Barat*.
- Wardhani, L., Maesaroh, & Widowati, N. (2020). *Peran Stakeholder Dalam Percepatan Penurunan Stunting Di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang*.